



BPK Minta LKPD Tepat Waktu

PONTIANAK - Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar Joko Agus Setyono berharap pemerintah daerah dapat menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu. Sekaligus penyajiannya diharapkan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Serta telah di-review oleh inspektorat/bawasda sebelum diserahkan kepada BPK RI. Kami harap, Pemda dapat menyerahkan LKPD harus tepat waktu," kata Joko saat menghadiri Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP)

Semester II di Aula BPK RI Kalbar, Jumat (13/12).

Dikatakannya, LHP yang diserahkan merupakan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Kalbar selama semester II. Yaitu terdiri dari lima LHP kinerja dan empat LHP dengan tujuan tertentu (DTT). Sedaangkan atas pemantauan penyelesaian kerugian daerah dan pemantauan TLRHP, telah diserahkan kepada 15 entitas. "Pemeriksaan kinerja bertujuan untuk menilai efektivitas, efisiensi dan ekonomi pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah daerah," jelasnya.

Ia menyebutkan dalam periode ini, pemeriksaan kinerja meliputi antara lain bidang pe-

nyediaan air minum pada PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak. Bidang pendidikan, yaitu peningkatan kualitas pembelajaran melalui penjaminan mutu dan implementasi kurikulum dalam mewujudkan terselenggaranya wajib belajar 12 tahun. Pada Pemerintah Kabupaten Sanggau dan Sekadau. Serta bidang kesehatan, yaitu pengelolaan dana dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar pada Pemerintah Kota Pontianak dan Singkawang.

Hasil dari pemeriksaan menunjukkan bahwa kinerja PDAM Tirta Khatulistiwa dan kinerja bidang kesehatan Pemerintah Kota Pontianak cu-

kup efektif. Sedangkan kinerja bidang pendidikan Pemerintah Kabupaten Sanggau dan Sekadau dan kinerja bidang kesehatan Pemerintah Kota Singkawang masih kurang efektif.

Sementara pemeriksaan DTT pada periode ini meliputi pemeriksaan pengelolaan kredit segmen menengah dan korporasi. Serta beban operasional dan non operasional PT BPD Kalbar dan pemeriksaan belanja daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan Pemerintah Kabupaten Landak.

Hasil dari pemeriksaan pada PT BPD Kalbar menunjukkan bahwa terdapat penyaluran fasilitas kredit yang tidak sesuai ketentuan dan tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian. Serta penetapan nilai dan realisasi remunerasi direksi dan komisaris tidak didukung keputusan RUPS dan/atau Dewan Komisaris.

Sedangkan hasil pemer-

PENYERAHAN :

Wagub Ria Norsan menghadiri penyerahan LHP TLRHP Semester II di Aula BPK RI Kalbar, Jumat (13/12).

HUMPRO KALBAR FOR PONTIANAK POST

iksaan atas belanja daerah meliputi ketidakpatunan terhadap peraturan atas proses pengadaan barang/jasa. Penetapan alokasi insentif, pengelolaan dana hibah bantuan sosial dan pembayaran

honorarium. "Selain itu, terdapat kekurangan volume dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan serta belum dikenakannya denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan," ujarnya. (bar/r)

